



RILIS
HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI XII DPR RI,
PADA MASA PERSIDANGAN I, TAHUN SIDANG 2024-2025
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN
09 - 13 DESEMBER 2024

Komisi XII DPR RI pada reses masa persidangan I, tahun sidang 2024-2025 melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan. Tim Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI dipimpin oleh Bapak Sugeng Suparwoto (Wakil Ketua Komisi-Fraksi Nasdem) dan dihadiri oleh anggota Komisi XII DPR RI dari berbagai fraksi.

Selama di Sulawesi Selatan, Tim Komisi XII DPR RI melaksanakan pertemuan dan peninjauan lapangan ke PLTB Tolo I Jeneponto yang memiliki kapasitas 72 MW. Dalam kegiatan tersebut, tim Komisi XII DPR RI didampingi oleh Iwan Suryana (Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kemeninves dan Hilirisasi/BKPM), Havidh Nazif (Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan KESDM), Harris (Kabalai Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, EBT, dan Konservasi Energi KESDM), Adi Lumakso (Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero)), sedangkan dari PT Vena Energi Indonesia (PT VEI) hadir Didik Kris Hananto (Direktur Operasi). Adapun dari Pemda Jeneponto hadir Junaidi B (Pj Bupati) beserta unsur pimpinan daerah jeneponto. Dalam paparannya PT VEI menyampaikan bahwa kinerja PLTB Tolo I sangat baik yang ditandai dengan capacity factor yang mencapai 42-45% setiap tahun, mereka juga menyampaikan bahwa PT VEI telah melakukan investasi EBET tidak saja di Jeneponto, tapi juga di Lombok dan Minahasa Utara yang jika beroperasi semua, PTVEI akan berkontribusi sebesar 186 MW di Indonesia. Sedangkan Pj Bupati menyampaikan bahwa Jeneponto, masih memiliki potensi EBT seperti air, bayu, dan surya yang masih bisa dikembangkan.

Terkait hal tersebut ketua tim Komisi XII DPR RI, menyampaikan bahwa kunjungan ini sangat penting dalam upaya pengembangan EBT apalagi kedepan energi

berbasis fosil akan semakin ditinggalkan dan memberikan apresiasi terhadap kinerja PLTB Tolo I yang sangat baik dalam sistem kelistrikan di Sulawesi Selatan. Komisi XII DPR RI mendorong agar PT VEI dapat meningkatkan investasi dan mengembangkan EBT yang tersebar di seluruh Indonesia, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat berbagai permasalahan yang harus dibenahi terutama yang berkaitan dengan harga (tarif) EBT dan masalah pembebasan lahan.

Selain pertemuan dan peninjauan lapangan ke PLTB Tolo 1 Jeneponto, Komisi XII DPR RI juga melakukan pertemuan dengan PT Vale Indonesia, PT Masmindo Dwi Area, dan Huady Group (Huady Nickel Alloy Indonesia). pada pertemuan tersebut, Tim Komisi XII DPR RI didampingi oleh Iwan Suryana (Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kemeninves dan Hilirisasi/ BKPM) dan Julian Ambassador Shiddiq (Direktur Pembinaan Program Minerba KESDM). sedangkan dari perusahaan hadir diantaranya Bernardus Irmanto (Direktur PT Vale Indonesia), Lily D Candinegara (Direktur Huadi Bantaeng Industrial Park (HBIP)), dan Rizal Adhi Bharata (GM Commercial & Corporate Affairs PT Masmindo Dwi Area).

Pada pertemuan tersebut, PT Vale Indonesia menyampaikan terkait kegiatan divestasi yang telah terlaksana dan komitmen untuk menyelesaikan proyek strategis terkait kegiatan hilirisasi yang sedang berlangsung, serta kegiatan reklamasi yang dilaksanakan. Selain itu PT Vale Indonesia mengharapkan adanya dukungan terkait penyesuaian perizinan kegiatan dikawasan hutan mengingat saat ini PT Vale Indonesia telah menjadi pemegang IUPK (bukan lagi Kontrak Karya), penyelesaian masalah kegiatan perkebunan di kawasan hutan yang termasuk wilayah IUPK PT Vale Indonesia, ketersediaan EBT yang terjangkau untuk industri ekstraktif mineral. sedangkan PT Masmindo Dwi Are menyampaikan perencanaan dan pencapaian saat ini termasuk target operasi. terkait target operasi produksi yang awalnya pada quartal pertama 2025 berubah menjadi 2026 dikarenakan adanya kendala operasional akibat kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan sehingga mobillitas peralatan terhambat, dan masalah kerusakan akibat bencana alam dan permasalahan klaim kepemilikan lahan. Dari Huadi Group group menyampaikan tentang kegiatan operasi yag menjadi tenant yang ada di kawasan industri HBIP, dimana salahsatu tenant tersebut adalah PT Huadi Nickel Alloy Indonesia dengan kapasitas produksi 350.000 MT Pertahun. Huadi group juga memiliki

peran penting bagi daerah dimana Huadi Group merupakan pembayar pajak terbesar di Kabupaten Bantaeng. Namun demikian Huadi Group menghadapi beberapa tantangan dan kendala terutama yang berkaitan dengan regulasi yang sering berubah yang berdampak bagi efektivitas proses investasi di Kawasan Industri, masalah keterbatasan pasokan bijih nikel dan masalah harga nikel yang semakin rendah semakin membebani perusahaan.

Terkait permasalahan tersebut, Julian dari Minerba KESDM mengakui bahwa masalah terbesar yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan terkait masalah lahan, masih adanya lahan tambang yang tumpang tindih dengan lahan lainnya, serta masalah pengelolaan tailing. Sedangkan dari Kementerian Investasi/BKPM menyampaikan bahwa akan membantu dalam pemberian kemudahan dalam memperoleh perizinan.

Adanya permasalahan-permasalahan tersebut, Komisi XII DPR RI menyampaikan bahwa kegiatan investasi harus memperhatikan dengan benar hasil kajian FS karena menyangkut biaya investasi yang sangat besar, terkait komitmen hilirisasi PT Vale Indonesia harus segera dituntaskan terutama yang berkaitan dengan dispute penggunaan jenis energy yang akan digunakan. Sedangkan masalah perizinan Kawasan Industri yang dihadapi oleh Huadi Group akan diteruskan ke Kementerian perindustrian yang menangani hal tersebut. Untuk PT Masmindo Dwi Are Komisi XII DPR RI sangat berharap agar segera dapat meningkatkan kegiatannya ke tahap operasi produksi sehingga bisa berkontribusi bagi daerah dan menyerap tenaga kerja lokal yang ada disekitar wilayah operasi pertambangan.

Terkait permasalahan reklamasi dan pascatambang, Komisi XII DPR RI akan mengagendakan kunjungan kerja ke PT Vale Indonesia untuk memastikan apakah PT Vale Indonesia telah melaksanakan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Sulawesi Selatan, 12 Desember 2024

Tim Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI

Ketua